

## **CONTRADICTIONS ECONOMIC GROWTH& INVESTOR EXIT IN INDONESIA**

**Chandra Hendriyani**

*Trainer and Lecture at Academic Secretary & Management Taruna Bakti (ASMTB)*

*Email: chandrahendriyani@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

*Slowing global economic growth and a decline in the level of trust business institutions in the Euro Area and the United Kingdom to Indonesia contributed to an economic slowdown in Indonesia. Although economic growth in Indonesia alone to increase, but it can not support the climate of the industry that is conducive and increasing purchasing power, as is still needed "invisible hand" of the government to minimize the "Transaction Cost" and "Relational Contract" and wages rill employees decreased resulting in decreased demand society to product processing industry which led to the departure of some foreign companies in Indonesia. The government's economic policy issued gradually expected to accelerate Indonesia out of the "vicious circle" both economic slowdown and improve Indonesia's competitiveness, in order to spur national economic growth and a better investment. Government policy hope will support company to make their business sustainable*

*Keywords : economic growth, transaction cost*

---

## **KONTRAKDIKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN HENGGANGNYA INVESTOR DI INDONESIA**

### **ABSTRAK**

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan turunnya tingkat kepercayaan lembaga bisnis di Kawasan Eropa dan Inggris terhadap Indonesia turut menyebabkan perlambatan ekonomi di Indonesia. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri meningkat namun hal tersebut tidak dapat mendukung iklim industry yang kondusif dan meningkatkan daya beli masyarakat karena masih diperlukan "invisible hands" dari pemerintah untuk memperkecil "Transaction Cost" dan "Relational Contract" serta upah rill pegawai menurun sehingga terjadi penurunan permintaan masyarakat terhadap produk industri pengolahan yang menyebabkan henggangnya beberapa perusahaan asing di Indonesia. Kebijakan ekonomi pemerintah yang dikeluarkan secara bertahap diharapkan dapat mempercepat Indonesia keluar dari "vicious circle" perlambatan ekomomi dan meningkatkan daya saing Indonesia, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan iklim investasi yang lebih baik. Kebijakan pemerintah diharapkan dapat mendukung

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, biaya transaksi

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian global terasa *turbulance* akibat dampak krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dimana kondisi keuangan AS cenderung turun dengan bunga investasi AS yang tinggi. Pemulihan Kawasan Eropa pun masih lambat, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun, dan ekonomi Jepang masih mengalami resesi. Nilai index saham Cina di pasar bursa yang terus turun juga memicu krisis global. Cina yang menjadi kekuatan ekonomi global terbesar ke-2 dunia dan jagonya ekspor komoditi, kini bursa sahamnya rontok. Situasi ini berimbas pada perdagangan saham di bursa Tokyo, Jepang. Sementara di Indonesia nilai tukar rupiah sudah relatif membaik sedangkan dollar menurun.

Dalam periode yang sama penurunan permintaan dunia diikuti oleh penurunan harga komoditas internasional, termasuk harga minyak dunia yang turun dengan tajam. Demikian juga perekonomian Indonesia yang dihadapkan pada makin sulitnya likuiditas dunia sejalan dengan kebijakan pengurangan/penghentian pembelian obligasi (*tapering off*) yang dilakukan oleh Bank Sentral AS. Melambatnya proses pemulihan ekonomi dunia, meningkatnya gejolak moneter dan keuangan global, tidak berjalan dan lambatnya proses reformasi struktural secara menyeluruh berimplikasi pada rendahnya pertumbuhan investasi dan konsumsi masyarakat.

*World Economic Forum* sebagai forum internasional setiap tahunnya mengeluarkan indeks daya saing global (*Global Competitiveness Report 2014-2015*) dengan penilaian berdasarkan 12 pilar daya saing, yaitu pengelolaan institusi yang baik, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, ukuran pasar, lingkungan bisnis, dan inovasi.

Pada tahun 2015 ini Indonesia naik ke peringkat 34 dari 144 negara. Posisi Indonesia ini berada di atas negara-negara seperti Spanyol yang berada di peringkat ke-35, Portugal di 36, Kuwait di peringkat 40, Turki di 45, Italia di 49, Afrika Selatan di peringkat 56, Brazil di peringkat 57, Meksiko di peringkat 61, serta India yang berada di peringkat 71. (*The Global Competitiveness Report 2014–2015*) Di kawasan ASEAN peringkat Indonesia ini masih kalah dengan tiga negara tetangga, yaitu Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31. Namun demikian, posisi Indonesia ini masih mengungguli Filipina yang berada di peringkat 52, Vietnam di peringkat 68, Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat 134.

Berdasarkan data *The Economist* menyebutkan untuk tahun 2015 Indonesia berada di peringkat kedua tujuan investasi Asia Pasifik, setelah China.

**Tabel 1: Skor Peringkat Prioritas Investasi**

	2014	2015
1 China	68.7	71.0
2 Indonesia	52.6	59.9
3 India	45.8	57.9
4 Malaysia	34.2	42.1
5 Singapura	30.7	41.2
6 Thailand	35.9	36.2
7 Australia	25.5	32.2
8 Hongkong	25.5	31.3
9 Korea Selatan	24.2	30.3
10 Jepang	26.3	24.3

Sumber: *The Economist*

Perekonomian domestik tahun 2015 berdasarkan data BPS diperkirakan tumbuh sebesar 5,8-6,2 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,8 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5 persen. Berdasarkan data dari *Trading Economics Com.* menunjukkan bahwa data konsumen Indonesia 2015 menunjukkan indeks kepercayaan konsumen meningkat 113%

per Januari 2016, belanja konsumen Rp 1,245 triliun per September 2015, dan kredit konsumen Rp 1.811 triliun per November 2015.

Namun seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini beberapa perusahaan besar malah henggang dari Indonesia dan menutup pabriknya seperti Ford, Panasonic, dan Toshiba. Hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk Indonesia per Juli 2015 diperkirakan 255,461,700 jiwa (CIA World Factbook:2015). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2015 sebesar 6,18 persen meningkat dibanding TPT Februari 2015 (5,81 persen) dan meningkat dibandingkan TPT Agustus 2014 (5,94 persen).

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat hal yang kontradiksi disatu sisi terjadi pertumbuhan ekonomi yang seharusnya meningkatkan investasi dan daya beli konsumen namun disatu sisi mengapa yang terjadi sebaliknya penutupan pabrik-pabrik dan henggangnya investor asing dari Indonesia. Tulisan ini akan mengulas tentang kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan henggangnya investor asing dari Indonesia justru di saat pertumbuhan Indonesia sedang meningkat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu.

Dengan perkataan lain bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif diukur dengan menggunakan *Gross Nasional Product (GNP)* atau *Produk Nasional Bruto* yaitu meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk, suatu negara (nasional) selama 1 tahun, termasuk hasil

produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada diluar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Negara tersebut dan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Produk Domestik Bruto*.

Apabila dikaji dari teori ini pertumbuhan ekonomi yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill dimana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Harrod-Domar (1957) untuk memperoleh pertumbuhan dalam jangka panjang apabila seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar yang hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan antara *growth* (tingkat pertumbuhan output), *capital* (tingkat pertumbuhan modal), dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Sedangkan Schumpeter menyatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh karena masyarakat telah merasa mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (*stationary state*).

Menurut Rostow dalam bukunya *The State of Economic Growth* (1960) mengemukakan lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi. Analisis ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental dalam corak kegiatan ekonomi, juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara. Sampai akhirnya muncul teori ekonomi kelembagaan baru yang merupakan sebuah paradigma baru di dalam mempelajari, memahami, mengkaji atau bahkan menelaah ilmu ekonomi diantaranya eksistensi sebuah perusahaan sebagai sebuah organisasi administratif dan keuangan. Dalam pandangan

ekonomi baru menurut Furubotn and Richter (2005) bahwa kondisi ekonomi yang tidak menentu akibat dari informasi yang tidak sempurna, eksternalitas serta fenomena *free-riders* yang diatur oleh pemerintah/institusi secara eksplisit maupun implisit berlaku dalam bisnis. Akibat dari timbulnya *transaction cost* dan *bounded rationality* maka perilaku lembaga pun harus berubah dan memiliki “*constitutional & operational rule*” untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis.

Dalam dinamika bisnis lembaga seringkali berada pada titik terendah dan mencapai kegagalan pasar. Beberapa pakar mengungkapkan kegagalan pasar dapat terjadi dikarenakan tidak adanya campur tangan pemerintah (Keynes, abad 20), kurang terlihatnya norma-norma sosial dalam perilaku social organisasi termasuk etika dan bisnis yang berguna untuk meningkatkan kepercayaan satu sama lain akibat informasi asimetris (Arrow: 1963) kemudian George Akerlof(1970) mengungkapkan bahwa nilai rata-rata komoditas cenderung menurun, bahkan untuk kualitas yang sangat sempurna karena para pembeli tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah produk yang mereka beli akan menjadi “lemon” (produk yang menyesatkan).

Demikian halnya Indonesia, untuk menurunkan sentimen negatif seputar krisis dan gejolak ekonomi dunia yang naik turun mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Paket kebijakan ekonomi jilid 1 yaitu insentif untuk semua pemangku kepentingan. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berupa proses deregulasi untuk investor, subsidi bunga kredit untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga rumah murah untuk masyarakat pekerja. Paket kebijakan ekonomi jilid 2, fokus undang investasi dengan lima jurus yaitu mengeluarkan ketetapan proses perizinan yang lebih sederhana, pengesahan

*tax allowance* dan *tax holiday* yang lebih cepat, pembebasan PPN untuk alat angkut tertentu, pajak bunga deposito yang lebih rendah bagi eksportir, dan meningkatkan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Paket kebijakan ekonomi jilid 3 adalah kuatkan daya saing usaha yaitu dengan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas, dan listrik, perluasan wirausahawan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penyederhanaan izin pertanahan dalam penanaman modal. Paket kebijakan ekonomi jilid 4 adalah formula perhitungan upah minimum dan kredit modal kerja untuk produsen barang ekspor. Paket kebijakan ekonomi jilid 5 adalah insentif untuk reevaluasi asset dan penghapusan pajak berganda dalam *Real Estate Investment Trust (REIT)*. Paket kebijakan ekonomi jilid 6 terdiri dari tiga paket kebijakan, yakni upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), penyediaan air untuk masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, simplifikasi perizinan di Badan Pengawasan

Obat dan Makanan (BPOM). Paket kebijakan ekonomi jilid 7 yaitu pengurusan izin investasi yang tiga jam memperoleh empat izin ditingkatkan menjadi delapan izin, memberikan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 untuk karyawan yang bekerja di industri padat karya, perubahan PP Nomor 18 tahun 2015 tentang PPh untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu, dengan diberikan fasilitas *tax allowance*, percepatan dan kemudahan sertifikasi tanah rakyat untuk memberikan kepastian hak atas tanah dan mendorong perekonomian masyarakat. Paket kebijakan ekonomi jilid 8 yaitu mempercepat pelaksanaan *one map policy* yang sangat mendesak agar bisa mencegah tumpang-tindih penggunaan lahan, menghilangkan tarif bea masuk untuk suku cadang pesawat, percepatan pembangunan dua kilang minyak baru percepatan pembangunan dua kilang minyak baru. Paket kebijakan ekonomi jilid 9 ini

bertumpu pada percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa-kota.

Namun kebijakan pemerintah tersebut bersifat jangka menengah dan panjang sehingga tidak dapat langsung merubah keadaan seperti membalikkan telapak tangan terjadi perubahan yang *significant* terlihat pada perekonomian Indonesia meskipun berdasarkan hasil penelitian BPS (2016) pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumbuh.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kausal-komperatif yang menurut Strauss & Corbin, 1990 (Dalam Cresswell, Jhon W, 2014:275) merupakan penelitian yang menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat serta mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu dengan desain penelitian berdasarkan *grounded theory* dimana peneliti berusaha mendapatkan sebuah teori dengan menggunakan tahap-tahap ganda pengumpulan data dan perbaikan dan hubungan timbal balik kategori-kategori informasi.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi global berpengaruh cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia. Menurut Yesi Hendriani Supartoyo,

Jen Tatum, dan Recky H. E. Sendouw (2013) laju pertumbuhan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan peningkatan kualitas angkatan kerja. Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif tapi tidak signifikan sehingga perlu adanya peningkatan kualitas penduduk dalam melakukan aktivitas ekonomi diimbangi dengan kuantitas penduduk.

Menurut Oktozuhri, Murni, Iskandar, Syarief (2010) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan negara ASEAN mengungkapkan bahwa investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia sebesar 1 persen akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,027 persen dan terdapat kecenderungan mengalami pertumbuhan yang meningkat sedikit dengan rata-rata pertumbuhan 6,0% per tahun. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan dan sekaligus penyumbang terbesar dalam penggunaan GDP Indonesia (Djoko Hanantijo, 2014).

Dari beberapa hasil penelitian di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh positif pada laju perekonomian dan meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Namun tidak demikian yang terjadi di Indonesia saat ini, diawali oleh hengkangnya PT Ford Motor Indonesia (FMI) dari Indonesia. FMI akan menghentikan semua operasinya di Indonesia dengan pertimbangan pasar Indonesia dinilai principal Ford Motor tidak memberikan keuntungan bisnis yang diharapkan khususnya 2 tahun terakhir ini.

Tabel 2: Penjualan Ford di Indonesia

2011	15.670
2012	11.958
2013	9.907
2014	12.007
2015	4.986

Sumber : Gaikindo, 2016

Tahun 2015 penjualan Ford anjlok sampai 50% meskipun dari data Gaikindo semua mobil pabrikan domestik mengalami penurunan penjualan di Indonesia sedangkan ekspor mengalami peningkatan. Keberhasilan ekspor tidak dapat dinikmati oleh Ford yang hanya memiliki *service* dan penjualan di Indonesia. Selama beberapa tahun pangsa pasar Ford pun tidak mencapai 1%.

Belum selesai pemerintah dan masyarakat dikagetkan oleh penutupan PT Ford Motor Indonesia (FMI), dua raksasa elektronik asal Jepang yaitu Toshiba dan Panasonic mengambil langkah yang sama dengan memutuskan menutup pabriknya yang berlokasi di Cikarang Bekasi dan Pasuruan Jawa Timur. Dampak yang langsung terlihat dari hengkangnya 3 perusahaan besar tersebut adalah jumlah pengangguran meningkat sekitar 2500 orang, sedangkan berdasarkan data Kementrian Ketenagakerjaan per Januari 2016, terjadi 208 kasus PHK dengan jumlah orang kehilangan pekerjaan sebanyak 1.377 PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta yakni mencapai 1047 pekerja.

Hal yang melatarbelakangi hengkangnya perusahaan besar tersebut sampai saat ini tidak pernah secara jelas disampaikan oleh perusahaan tersebut. Namun menurut pengamatan penulis apa bila dilihat dari kajian teori adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus terus meningkatkan kepercayaan kepada negara-negara lain seperti yang diungkapkan oleh Arrow "*less visible form of social action: norms of social behaviour, including ethical and moral codes .It is useful for individuals to have some trust in each other's word*" agar mau dan tetap mempertahankan investasinya. Pemerintah harus dapat menghapus persepsi negatif yang ada di Kantor Dagang Inggris dan Eropa dimana tingkat kepercayaan investor dan pebisnis Eropa dan Inggris untuk berinvestasi di Indonesia anjlok dari 21% dari 71% pada

2014 lalu, menjadi 50% pada periodes survei November 2015 hingga Januari 2016.

2. Dalam era perdagangan bebas sesuai dengan pendapat Oliver Wiliiamson (1975) diperlukan "*invisible hands*" untuk menekan "*transaction cost*". Untuk permasalahan di Indonesia diperlukan campur tangan pemerintah yang intensif karena dengan setiap kebijakan diharapkan dapat menciptakan iklim industri yang sehat sehingga tercapai efisiensi (Scott, 1993).
3. Di Indonesia, biaya transaksi merupakan salah satu penyebab terbesar melemahnya daya saing pelaku-pelaku ekonomi baik dalam melakukan penetrasi pasar domestik maupun pasar global. Besarnya biaya transaksi menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang dapat melemahkan daya saing pelaku ekonomi di Indonesia yang akan berdampak negatif jika ditinjau secara makro. Masalah *debottlenecking* juga paling banyak terjadi di Indonesia akibat permasalahan birokrasi dan perizinan yang berbelit-belit. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah mendirikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
4. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 sebagai penjabaran dari Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan diberlakukannya PP ini, upah buruh akan naik paling tinggi hanya 10 persen dan berlaku selama puluhan tahun. Undang-undang ini menyebabkan nilai upah buruh Indonesia murah, dimana gaji rata-rata per bulan buruh di Indonesia tercatat sebesar Rp3,67 juta. Pada umumnya, seluruh pegawai di Indonesia menerima gaji di kisaran Rp 2,5 juta-Rp 5 juta per bulan. Di antara 10 negara Asean, Indonesia menduduki peringkat ke-delapan dengan gaji buruh terendah. Menurunnya upah rill sehingga daya beli masyarakat menurun

Menurunnya daya beli masyarakat tentu berdampak langsung pada penurunan produktivitas nasional, utamanya penurunan permintaan masyarakat terhadap produk industri pengolahan. Dampaknya, pertumbuhan kinerja sektor manufaktur anjlok, pada triwulan I 2015 hanya tumbuh 3,81 persen. Banyak industri, terutama usaha kecil dan menengah, mengalami kesulitan kelangsungan usaha. Akibatnya, banyak penyaluran kredit yang menurun dan hal ini diperparah dengan fakta *non-performing loan* (NPL) juga meningkat. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan kontributor terbesar, biasanya tumbuh pada kisaran 5,5 persen, kini melorot menjadi 4,9 persen.

### SIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi tidak optimal seiring dengan terjadinya perlambatan ekonomi secara global dan domestik. Hal ini juga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat sehingga perusahaan-perusahaan yang tidak dinamis mengikuti perkembangan zaman dan teknologi tidak dapat bersaing untuk memperluas *market share*nya.

Keterlambatan perusahaan dalam merespon perubahan pasar dan lingkungan industri menurut penulis menyebabkan terjadi perusahaan-perusahaan besar menutup bisnis dan hengkang dari Indonesia.

Upaya pemerintah untuk membantu percepatan ekonomi dengan paket-paket kebijakan merupakan strategi untuk menstimulasi perekonomian agar tetap berjalan. Di antaranya, memperbaiki sistem perbankan dan juga sistem birokrasi, menurunkan BI rate sebesar 7,25 persen, memudahkan program-program investasi, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak

(PTKP) bagi wajib pajak orang pribadi dari Rp24 juta menjadi Rp 36 juta per tahun, penerbitan Peraturan Pemerintah No. 18/2015 tentang *tax allowance* atau keringanan pajak bagi investor yang berniat mengembangkan usaha di area ini

Pada akhirnya untuk dapat keluar dari “*vicious circle*” perlambatan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia, meningkatkan daya beli masyarakat maka masih diperlukan “*invisible hands*” dari pemerintah untuk memperkecil “*Transaction Cost*” dan “*Relational Contract*” agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan iklim investasi yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- 2015.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
- Creswell, Jhon W. 2014. *Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Pendekatan Kuantitatif. dan Mixed* Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Daulay, Murni, Oktozuhri, Iskandar, Rujiman 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara ASEAN. Jakarta:Jurnal Ekonomi.
- Furubotn and Richter. 2005, Institutional economics. Published in the United States of America by The University of Michigan Press.
- Hanantijo, Djoko.2014. Konsumsi Nasional Sebagai Penggerak Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
- K. Arrow, "The Organization of Economic Activity," in *The Analysis and Evaluation* VOL. 63 NO. 2 *Organizational Forms And Internal Efficiency* 325 of *Public Expenditure: The PPB System*, 1, Joint Economic Committee, 91<sup>st</sup> Congress, Washington 1969, 59-73.

- Rostow, W.W,1960, *The State of Economic Growth*. New York :Cambridge University Press.
- Scott, John T. 1993. *Purposive Diversification and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- Supartoyo, Yesi Hendriani, cs .2013. *The Economic Growth And The Regional Characteristics: The Case Of Indonesia*. Jakarta: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan
- Williamson, Oliver E .1973., *Market & Hierarchies:Some Elementary Considerations*
- <http://www.bareksa.com/id>, diakses tanggal 11 Februari 2016.
- <https://bisnis.tempo.co/id>, diakses tanggal 11 Februari 2016.
- <http://www.kompas.com/>, diakses tanggal 11 Februari 2016.
- <http://www.detik.com/>, diakses tanggal 11 Februari 2016.
- <http://swa.co.id/>, diakses tanggal 11 Februari 2016.
- <http://www.gaikindo.or.id/>, diakses tangg